

**SISTEM PENERIMAAN KAS ATAS PENDAPATAN KLAIM
BPJS DAN NON BPJS PADA RSUD SITI AISYAH KOTA
LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Akuntansi**

Oleh :

VEPI KARLINA

NIM. 19.01.02.0070P

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN
LUBUKLINGGAU
2021**

ABSTRACT

The problem in this study is that there has been a decrease in cash receipts from BPJS income by 40%, and Non BPJS income by 50%, this is a result of the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policies both at the central and regional levels, consequently making technical employees in BPJS claim administration is hampered due to Work From Home. This study uses data collection methods by observing and recording directly at the research site (observation), conducting direct questions and answers to sources (interviews), and documentation by reading literature guidelines. The results showed that the BPJS Cash Receipt and Non BPJS Claim Cash Receipt systems at Siti Aisyah Hospital Lubuklinggau City were good, and the information provided was reliable, relevant, complete, timely, understandable and verifiable. Comparison of BPJS Claims in 2019 and 2020 cash receipts on BPJS income the difference of Rp. 8,558,000,000, - or a decrease of 40%. While the Comparison of Non BPJS Claims in 2019 and 2020 cash receipts for Non BPJS income is Rp. 3,829,842,425,- or a decrease of 50%.

Keywords: Cash Receipts, BPJS, and Non BPJS

ABSTRAK

Masalah pada penelitian ini adalah telah terjadi penurunan penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar 40%, dan pendapatan Non BPJS menurun sebesar 50%, hal tersebut akibat dari penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik tingkat pusat maupun di daerah, akibatnya membuat pegawai teknis dalam administrasi klaim BPJS menjadi terhambat dikarenakan adanya *Work From Home* (Kerja dari rumah). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung pada tempat penelitian (observasi), melakukan tanya jawab langsung pada sumber (interview), dan dokumentasi dengan cara membaca pedoman-pedoman literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Penerimaan Kas Klaim BPJS dan Klaim Non BPJS pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau sudah baik, serta informasi yang diberikan handal, relevan, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat di verifikasi. Perbandingan Klaim BPJS Pada Tahun 2019 dan 2020 penerimaan kas atas pendapatan BPJS selisih sebesar Rp. 8.558.000.000,- atau terjadi penurunan sebesar 40%. Sedangkan Perbandingan Klaim Non BPJS Pada Tahun 2019 dan 2020 penerimaan kas atas pendapatan Non BPJS selisih sebesar Rp. 3.829.842.425,- atau terjadi penurunan sebesar 50%.

Kata Kunci : Penerimaan Kas, BPJS, dan Non BPJS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, untuk diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Pada Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan skripsi ini, baik dari segi isi maupun dari segi desain. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun. Untuk selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Sardiyo selaku Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Sutanta, Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Wakhid Mukhlis, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah memberikan motivasi, semangat dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Indrawati Mara Kesuma, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.

6. Ibu Dewi Anggraini, S.E., M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Yuli Nurhayati, S.E., M.Si., Ak selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.
8. Direktur dan Staf di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau (tempat penelitian).
9. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi untuk penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Halaman Daftar Riwayat Hidup.....	vi
<i>Abstract</i>	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Batasan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Literatur	9
2.1.1. Pengertian BPJS	9
2.1.2. Ketentuan Umum BPJS	9
2.1.3. Pendapat Bersumber Non BPJS.....	11
2.1.4. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi	12
2.1.5. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	12
2.1.6. Komponen Sistem Informasi Akuntansi	13
2.1.7. Aspek-Aspek Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi	14
2.1.8. Pengertian Sistem Akuntansi.....	14
2.1.9. Manfaat Sistem Akuntansi	15
2.1.10. Fungsi Sistem Akuntansi	16
2.1.11. Akuntansi Penerimaan Kas.....	16
2.1.12. Prosedur Penerimaan Kas.....	17
2.2. Penelitian Yang Relevan	23
2.3. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.2. Rancangan Penelitian	27
3.3. Prosedur Penelitian	28
3.4. Data dan Sumber Data	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Teknik Analisis Data	30
3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	36
	4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
	4.2. Hasil Penelitian.....	39
BAB V	PEMBAHASAN	49
	5.1. Sistem Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Klaim BPJS Kesehatan Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau	49
	5.2. Sistem Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau	52
BAB VI	SIMPULAN DAN SARAN	56
	6.1. Simpulan.....	56
	6.2. Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Kas atas Pendapatan BPJS dan Non BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau	5
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan	23
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	26
Tabel 4.1 Data Penerimaan Kas atas Pendapatan BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau	39
Tabel 4.2 Data Penerimaan Kas atas Pendapatan Non BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Akuntansi/Pembukuan	19
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	25
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud pelayanan, pencegahan, pengobatan dan rujukan secara tepat dan cepat, juga dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran, dimana peralatan-peralatan pendukung mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit yang memerlukan biaya investasi yang sangat besar, memaksa pihak manajemen mau tidak mau mengubah pandangan dari yang semata-mata bersifat sosial menjadi bersifat ekonomis. Sejalan dengan itu, meningkatnya serta timbulnya persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan jasa kesehatan, dalam mencari terobosan-terobosan baru dan cara-cara baru guna menyempurnakan sistem yang telah ada. Untuk mencapai tujuan rumah sakit yang telah ditentukan, cara yang digunakan untuk sistem tersebut adalah dengan mendapatkan hasil yang dicapai dengan cepat dan akurat. [1]

Suatu sistem yang baik sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perdagangan maupun perusahaan jasa dalam menjalankan kegiatan usahanya. Keberadaan sistem tersebut, dapat membantu tugas-tugas unit organisasi terkait. Setiap perusahaan akan menggunakan sistem yang paling sesuai dengan aktivitas perusahaan yang dijalankan, sederhana dalam pelaksanaan serta mudah dalam pengawasannya. [2]

Sistem penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai macam sumber yaitu dari penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman dan setoran modal baru. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan. [2] Prosedur penerimaan kas dalam perusahaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak diterimanya uang yang seharusnya diterima dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin.

Prosedur penerimaan kas perlu memperhatikan hal sebagai berikut yaitu terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, yang menerima dan yang mencatat penerimaan uang. Apabila untuk sebuah perusahaan kecil pemisahan demikian tidak dapat dilakukan, maka penggabungan antara ketiga tugas tadi hanya dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan. Setiap penerimaan uang langsung disetor ke bank sebagaimana adanya. [3]

Pada penerimaan kas rumah sakit berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari pendapatan pasien BPJS berdasarkan Klaim Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terdiri dari Klaim Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Persalinan/maternal dan neonatal non kapitasi (berdasarkan jenis dan pelayanan yang diberikan) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pelayanan Darah, Pelayanan Obat Program Rujuk Balik, Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Program Rujuk Balik, Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Skrining Kesehatan dan Pelayanan Lain di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Berdasarkan Klaim Faskes Tingkat Lanjutan terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, berdasarkan Klaim Pelayanan Gawat Darurat, berdasarkan

Klaim Alat Kesehatan, berdasarkan Klaim Kompensasi Pelayanan Di Daerah Tidak Ada Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Syarat, berdasarkan Klaim *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*.

Penerimaan kas dari pendapatan pasien non BPJS berdasarkan Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan rawat jalan, pendapatan rawat inap, pendapatan tindakan medis, pendapatan penunjang medis, pendapatan operasional lainnya. Berdasarkan Penghasilan non operasional terdiri pendapatan jasa lembaga keuangan, pendapatan kerja sama operasi (KSO), pendapatan sewa.

Bagi rumah sakit umum yang memiliki banyak instalasi dan bagian lain, permasalahan transaksi penerimaan kas atas pendapatan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh pihak rumah sakit. Karenanya penerimaan kas atas pendapatan ini sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan rumah sakit kedepannya. Aktifitas penerimaan kas atas pendapatan merupakan salah satu kegiatan bagi rumah sakit setelah memberikan jasa pelayanan bagi pasien, baik itu pelayanan jasa rawat inap, jasa rawat jalan dan lain sebagainya. Transaksi penerimaan kas menyebabkan aset perusahaan berupa kas atau setara dengan kas bertambah. [4]

Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau adalah salah satu perusahaan jasa yang dikelola oleh pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan. Pelayanan Medik meliputi Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Bedah Sentral, *Intensive Care Unit (ICU)*, dan Hemodialisa. Serta penunjang medik meliputi Radiologi,

Rekam Medik, Instalasi Farmasi, Laboratorium, Fisioterapi, Instalasi Gizi, Instalasi Pemulasaran Jenazah, IPAL, IPSRS, CSSD, dan Laundry.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Aisyah merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Lubuklinggau, yang pertama kali didirikan berdasarkan akte notaris Badiah Azhary. SH. Nomor. 35 tanggal 30 Maret 1990 dalam bentuk Yayasan yang diketua oleh Drs. H. Muhamad Syueb Tamat. Penyelenggaraan Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah berdasarkan surat izin sementara Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Selatan Nomor. YM.01.02.3.2.8420 tanggal 10 Oktober 1994.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 12 Februari 2021, dilakukan wawancara dengan ibu Dione, S.E., M.M selaku Bendahara RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, mengatakan bahwa penerimaan kas atas pendapatan BPJS mengalami penurunan sebesar Rp. 8.558.000.000,- atau terjadi penurunan hingga 40%, Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan non BPJS mengalami penurunan pendapatan hingga Rp. 3.839.842.425,- atau terjadi penurunan hingga 50%. Hal yang demikian terjadi akibat dari penerapan dari kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik tingkat pusat maupun didaerah, serta meminimalisir terjadinya penularan COVID 19 di Kota Lubuklinggau akibatnya membuat pegawai teknis dalam administrasi klaim BPJS menjadi terhambat dikarenakan adanya *Work From Home* (Kerja dari rumah). Adapun data tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Kas atas Pendapatan BPJS dan Non BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau

Bulan	BPJS		Non BPJS	
	2019	2020	2019	2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Januari	2.100.000.000	2.300.000.000	912.040.742	557.833.424
Februari	1.550.000.000	1.900.000.000	806.172.435	432.628.138
Maret	1.545.000.000	1.600.000.000	721.436.914	417.900.520
April	1.700.000.000	571.000.000	686.191.175	222.282.988
Mei	1.500.000.000	754.000.000	676.583.386	280.523.286
Juni	1.500.000.000	820.000.000	485.444.114	212.331.601
Juli	1.700.000.000	963.000.000	661.075.367	281.708.712
Agustus	1.792.000.000	929.000.000	477.212.769	206.153.912
September	1.782.000.000	909.000.000	506.051.206	295.735.663
Oktober	2.070.000.000	769.000.000	627.905.730	206.153.912
November	2.200.000.000	793.000.000	527.441.675	415.294.270
Desember	2.170.000.000	743.000.000	592.393.816	311.560.478
Jumlah	21.609.000.000	13.051.000.000	7.679.949.329	3.840.106.904

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 21.609.000.000,- sedangkan pada Tahun 2020 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 13.051.000.000,- atau selisih sebesar Rp. 8.558.000.000,- atau terjadi penurunan sebesar 40%. Berdasarkan Penerimaan kas atas pendapatan non BPJS yang diterima pada Tahun 2019 sebesar Rp. 7.679.949.329,- sedangkan

pada Tahun 2020 penerimaan kas non BPJS sebesar Rp. 3.840.106.904,- atau selisih Rp. 3.839.842.425,- atau terjadi penurunan sebesar 50%.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul *“Sistem Penerimaan Kas Atas Pendapatan Klaim BPJS Dan Non BPJS Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau”*.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini terletak pada sistem penerimaan kas pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

b. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus penelitian ini adalah :

- 1) Pendapatan Klaim BPJS
- 2) Pendapatan Klaim Non BPJS

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem penerimaan kas BPJS Kesehatan pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau ?
- b. Bagaimana sistem penerimaan kas non BPJS Kesehatan pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau ?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada Sistem Penerimaan Kas Atas

Pendapatan Klaim BPJS Dan Non BPJS Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui sistem penerimaan kas BPJS Kesehatan pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui sistem penerimaan kas non BPJS Kesehatan pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi akademisi, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.
- 2) Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang Sistem Penerimaan Kas Atas Pendapatan Klaim BPJS Dan Non BPJS Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem penerimaan kas baik BPJS maupun Non BPJS.

2) Bagi peneliti, peneliti dapat mengimplementasikan apa yang telah peneliti dapat dari perguruan tinggi melalui penyusunan tugas akhir skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literatur

2.1.1 Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[5]

Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [5]

2.1.2 Ketentuan Umum BPJS

Ketentuan Umum dalam BPJS sebagai berikut :

- a. Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali kapitasi, tidak perlu diajukan klaim oleh Fasilitas Kesehatan.
- b. BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan.
- c. Kendali Mutu dan Biaya.
 - 1) Dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis.

- 2) Tim kendali mutu dan kendali biaya dapat melakukan:
 - a) sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi;
 - b) *Utilization review* dan audit medis; dan/atau
 - c) pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan.
- 3) Pada kasus tertentu, tim kendali mutu dan kendali biaya dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan Peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada Fasilitas Kesehatan sesuai kebutuhan.

d. Kadaluarsa Klaim.

1) Klaim Kolektif

Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta, baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah 2 (dua) tahun setelah pelayanan diberikan.

2) Klaim Perorangan

Batas waktu maksimal pengajuan klaim perorangan adalah 2 (dua) tahun setelah pelayanan diberikan, kecuali diatur secara khusus.

e. Kelengkapan Administrasi Klaim Umum.

f. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

1) Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga)

- 2) Softcopy data pelayanan bagi Fasilitas Kesehatan yang telah menggunakan aplikasi P-Care/aplikasi BPJS Kesehatan lain (untuk

PMI/UTD) atau rekapitulasi pelayanan secara manual untuk Fasilitas Kesehatan yang belum menggunakan aplikasi P-Care.

- 3) Kuitansi asli bermaterai cukup
- 4) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga.
- 5) Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim

g. Fasilitas Kesehatan Lanjutan

- 1) Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga),
- 2) Softcopy luaran aplikasi
- 3) Kuitansi asli bermaterai cukup
- 4) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga.
- 5) Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim

2.1.3 Pendapatan Bersumber Non BPJS

Menurut [6] pendapatan RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau dalam memberikan pelayanan yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat
- b. Pemeriksaan Kesehatan/ Medical Check Up (diluar biaya laboratorium dan rontgen)
- c. Pelayanan Rawat Inap

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.[7]

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. [8]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah struktur yang saling berkaitan antar setiap subsistem yang berkaitan dengan akuntansi. Sehingga perlu tanggung jawab dan koordinasi yang jelas antar subsistem agar tercipta keteraturan dalam suatu sistem.

2.1.5 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi memiliki empat tujuan umum dalam penyusunannya, yaitu: [8]

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha yang baru ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.

- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal (biaya tulis menulis) dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2.1.6 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Beberapa komponen Sistem Informasi Akuntansi yaitu sebagai berikut : [8]

- a. Manusia adalah pelaku yang menjalankan system
- b. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan, lalu diproses sehingga menghasilkan informasi
- c. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan.
- d. Dokumen yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat transaksi
- e. Peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan.

2.1.7 Aspek-Aspek Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Aspek-Aspek karakteristik yang membuat suatu informasi berguna dan memiliki arti bagi pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut : [8]

- a. Relevan, informasi harus memiliki makna yang tinggi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi yang menggunakannya dan dapat digunakan secara tepat untuk membuat keputusan.

- b. Andal, suatu informasi harus memiliki keterandalan yang tinggi, informasi yang dijadikan alat pengambil keputusan merupakan kejadian nyata dalam aktivitas perusahaan.
- c. Lengkap, informasi tersebut harus memiliki penjelasan yang rinci dan jelas dari setiap aspek peristiwa yang diukurnya.
- d. Tepat waktu, setiap informasi harus dalam kondisi yang updatetidak dalam bentuk yang usung, sehingga penting untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan.
- e. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam bentuk yang jelas akan memudahkan orang dalam menginterprestasikannya.
- f. Dapat diverifikasi, informasi tersebut tidak memiliki arti yang ambigu, memiliki kesamaan pengertian bagi pemakainya.

2.1.8 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. [9]

Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. [10]

Sistem Akuntansi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengelolah data menjadi informasi yang berguna. [11]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah alat yang digunakan sebagai transaksi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan dalam menentukan kebijakan- kebijakan atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

2.1.9 Manfaat Sistem Akuntansi

Menurut [9], Adapun manfaat yang terkait dengan sistem akuntansi yaitu :

- a. Menyajikan suatu informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatan utama pada *value chain* secara efektif dan juga efisien.
- b. Memberikan informasi keuangan sebagai dasar membuat keputusan managerial.
- c. Mengembangkan kualitas dan juga mengurangi biaya produksi produk maupun jasa yang dihasilkan.
- d. Memberikan informasi/ laporan kepada pihak eksternal.
- e. Mengembangkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan juga bagian lainnya.
- f. Sebagai alat kontrol dan pengendali keuangan.
- g. Mengembangkan keahlian dalam keadaan pengambilan keputusan.
- h. Sebagai alat evaluasi perusahaan.
- i. Mengembangkan *sharing knowledge*.
- j. Menjadi dasar dalam mengalokasikan sumber daya.

2.1.10 Fungsi Sistem Akuntansi

Fungsi utama dari sistem akuntansi adalah menjadikan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang ada dalam sistem ini berkaitan satu sama lain sehingga dapat dilakukan pengolahan data dari awal hingga pelaporan akhir. sistem akuntansi dibuat untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti memegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi. [12]

2.1.11 Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu dari penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman baik, dan setoran modal baru. [13]

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dan penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. [9]

Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Penerimaan kas organisasi berasal dari dua sumber utama yaitu

: penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penjualan kredit. [9]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi wajib adanya langkah-langkah yang tepat dalam sistem penerimaan kas, sehingga organisasi berjalan dengan semestinya dan tidak ada kecurangan atau menyalah gunakan kas perusahaan. Prosedur yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan organisasi yang berasal dari kas penjualan tunai dan kas penjualan kredit.

2.1.12 Prosedur Penerimaan Kas

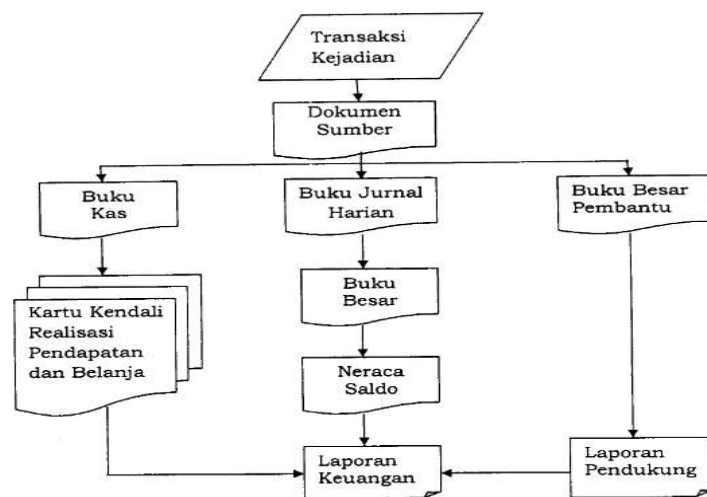
Prosedur dimaksud Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Aisyah Kota Lubuklinggau pada pasal 9 prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi : [6]

- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. Prosedur akuntansi aset;
- d. Prosedur akuntansi selain kas.

Berdasarkan prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

Fungsi pembukuan atas transaksi keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan oleh Kepala Bidang Keuangan selaku Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Output dari siklus akuntansi berupa Laporan Keuangan Pokok yang terdiri atas Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Aktivitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.[6]

Siklus akuntansi/pembukuan dimulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan dapat terlihat melalui bagan alur sebagai berikut: [6]



Gambar 2.1
Siklus akuntansi/pembukuan

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi penerimaan kas dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan dengan menggunakan

aplikasi perbantuan komputer. Prosedur akuntansi penerimaan kas Klaim BPJS dan Non BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dilaksanakan oleh Bidang Keuangan yaitu : [6]

a. Fungsi yang terkait dengan BPJS: [14]

- 1) Petugas, Kasir dan Admin UGD
- 2) Petugas Rekam Medik
- 3) Petugas Rawat Inap
- 4) Petugas Verifikator BPJS Kesehatan
- 5) Bendahara Penerimaan

b. Bukti Transaksi yang digunakan : [14]

- 1) Lembar Pendaftaran;
- 2) Excel kunjungan pasien BPJS Per Shift.
- 3) Resume Medis
- 4) Berkas Klaim dan Resume
- 5) Cetak Hasil INA-CBG'S

c. Buku yang digunakan : [14]

- 1) Buku jurnal penerimaan kas
- 2) Buku Besar, dan
- 3) Buku Besar Pembantu.

d. Prosedur Klaim : [14]

- 1) Verifikasi Administrasi Kepesertaan;
- 2) Verifikasi Administrasi Pelayanan;
- 3) Verifikasi Pelayanan
- 4) Verifikasi Menggunakan Software Verifikasi

e. Langkah kerja : [14]

- 1) Petugas Pendaftaran UGD melakukan pelayanan terhadap pasien BPJS, lalu keluarga pasien disarankan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- 2) Petugas Rekam Medik dan Dokter betugas melakukan pemeriksaan, admin UGD merekap Resume Medis dan Berkas yang disiapkan untuk klaim.
- 3) Lalu verifikator dari BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan berkas layak atau tidak layak untuk dilakukan klaim.
- 4) Verifikator melakukan Costing atas kompilasi berkas klaim, dan melakukan finalisasi administrasi diantaranya (Resume medis, BRM, Poli Kartu)
- 5) Bendahara Penerimaan melakukan Input INA-CBG'S dan cetak, lalu melakukan klaim ke Kantor BPJS.
- 6) Petugas BPJS Kesehatan membuat formulir pengajuan klaim, data xml, Persetujuan klaim, dan melakukan Pembayaran Klaim melalui Rekening RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
- 7) Pada setiap akhir bulan dilakukan pencetakan buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan yang diperlukan.

f. Fungsi yang terkait dengan Non BPJS: [6]

- 1) Bendahara Penerimaan;
- 2) Bidang pelayanan/Pengendali Jaminan Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- 4) Verifikator Jaminan Kesehatan;

5) Sub Bidang Pembukuan dan Aset.

g. Bukti Transaksi yang digunakan : [6]

- 1) Surat ketetapan tarif (SKT)
- 2) Surat tanda setoran harian (STSH) oleh kasir;
- 3) Surat tanda setoran oleh bendahara penerima;
- 4) Dokumen persetujuan klaim jaminan kesehatan;
- 5) Laporan hasil verifikasi oleh verifikator jaminan kesehatan;
- 6) Kuitansi Pembayaran;
- 7) Rekapitulasi Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan;

h. Buku yang digunakan : [6]

- 1) Buku jurnal penerimaan kas
- 2) Buku Besar, dan
- 3) Buku Besar Pembantu.

i. Prosedur Klaim : [15]

- 1) Prosedur Pembuatan Dokumen Pembebanan.
- 2) Prosedur Pembuatan Surat Ketetapan Tarif.
- 3) Prosedur Penerimaan Kas dari Pasien/Pengguna Jasa Layanan.
- 4) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas.
- 5) Prosedur Verifikasi Penerimaan Kas.
- 6) Prosedur Pencatatan Akuntansi.

j. Langkah kerja : [6]

- 1) Sub bidang pembukuan dan aset melalui aplikasi akuntansi yang terkoneksi dengan aplikasi penatausahaan mencetak jurnal penerimaan kas kemudian evaluasi;

- 2) Evaluasi terhadap jurnal penerimaan kas dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian rekening dan kebenaran jumlah jurnal transaksi dengan bukti transaksi yang diterimannya dari bendahara penerimaan, bidang pelayanan/pengendali jaminan kesehatan, sub bidang anggaran dan perbendaharaan dan verifikator jaminan kesehatan;
- 3) Bila terdapat kesesuaian, kepala sub bidang pembukuan dan aset membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan bahwa transaksi telah dicatat dan diikhtisarkan dengan benar;
- 4) Pada setiap akhir bulan dilakukan pencetakan buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan yang diperlukan.

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

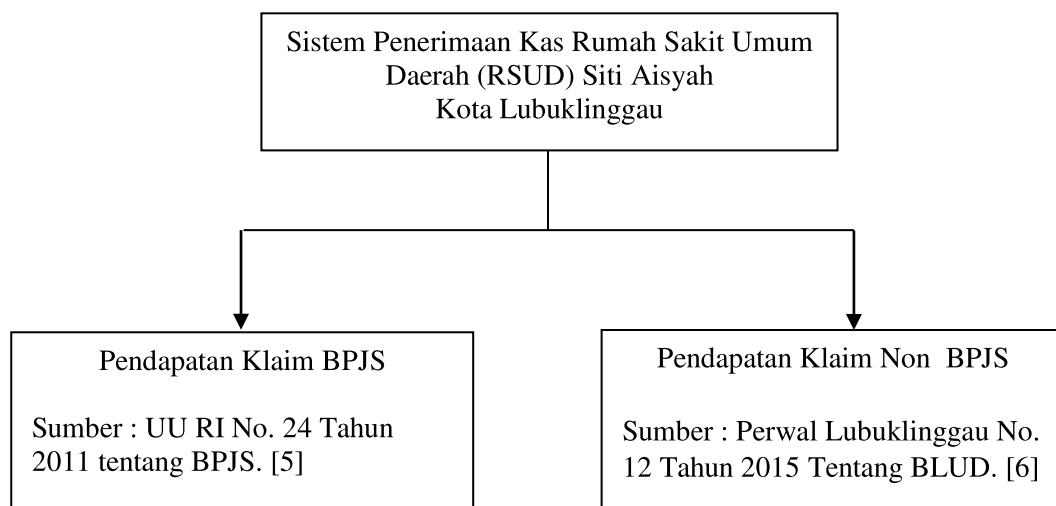
No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fatimah dan Achmar, Muhammad Nuzul.	2020	Sistem Penerimaan Kas Atas Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS pada RSUD A. Makkasau kota pare-pare	Hasil menunjukkan bahwa klaim bpjs sebesar Rp. 56.600.621.120 atau 86%, sedangkan non bpjs sebesar Rp. 7.977.908.159 atau 14%. tingkat perbandingan antara pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS sebesar 72%.
2	Rifandi, Muhammad dan Shofiani, Prima	2019	Pengaruh Sistem Pembayaran Asuransi Kesehatan BPJS Terhadap Akuntansi	Adanya metode sistem pembayaran BPJS ini berdampak pada akuntansi pendapatan rumah sakit dimana arus

			Pendapatan Rumah Sakit(Studi Pada RS PKU Muhammadiyah Gamping)	kas masuk tertunda, namun demikian rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat mengatasinya dengan menyisihkan dana cadangan yang telah dianggarkan tiap awal tahun.
3	Suhartoyo	2018	Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA–CBGs	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diakibatkan oleh telah tersediannya instrumen teknis petunjuk pelaksanaan pembayaran klaim Rumah Sakit Kepada BPJS yang berorientasi pada perlindungan profesi kesehatan di Rumah sakit, melalui penjenisan dan penggolongan rumah sakit.
4	<i>Fonseca, Luiza. Lima, Lillia and Gualdi, Lucien</i>	2020	<i>Characterization of Brazilian hospital admissions due to cardiovascular diseases:a longitudinal study</i>	<i>The number of registered deathscaused by any CVD was 867,838 and the national mortality rate was 7.82.Conclusion:CVD were responsible for around 10% of all hospital admissions in Brazil between 2008 and 2017. Moreover, it was possible to observe a decrease in hospital admissions as well as mortality rate over strategies to prevent cardiovascular diseases.</i>

5	<i>Okoroh, Juliet, et al.</i>	2020	<i>Does insurance protect individuals from catastrophic payments for surgical care? An analysis of Ghana's National Health Insurance Scheme at Korle-Bu teaching Hospital</i>	<i>This study—the first to evaluate the impact of insurance on financial risk protection for surgical patients in Ghana—found that although insured patients were less likely than uninsured to face financial catastrophe as a result of their surgery, more than half of insured surgical patients treated at KBTH were not protected from financial catastrophe under the Ghana's national health insurance scheme due to out-of-pocket payments.</i>
---	-------------------------------	------	---	--

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir penelitian ini adalah Sistem Penerimaan Kas Atas Pendapatan Klaim BPJS Dan Non BPJS Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan untuk seluruh RSUD Siti Aisyah Jl. Lapter Silampari No.20, Air Kuti, Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31626.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2021 sampai dengan September 2021 dengan alokasi pembagian waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

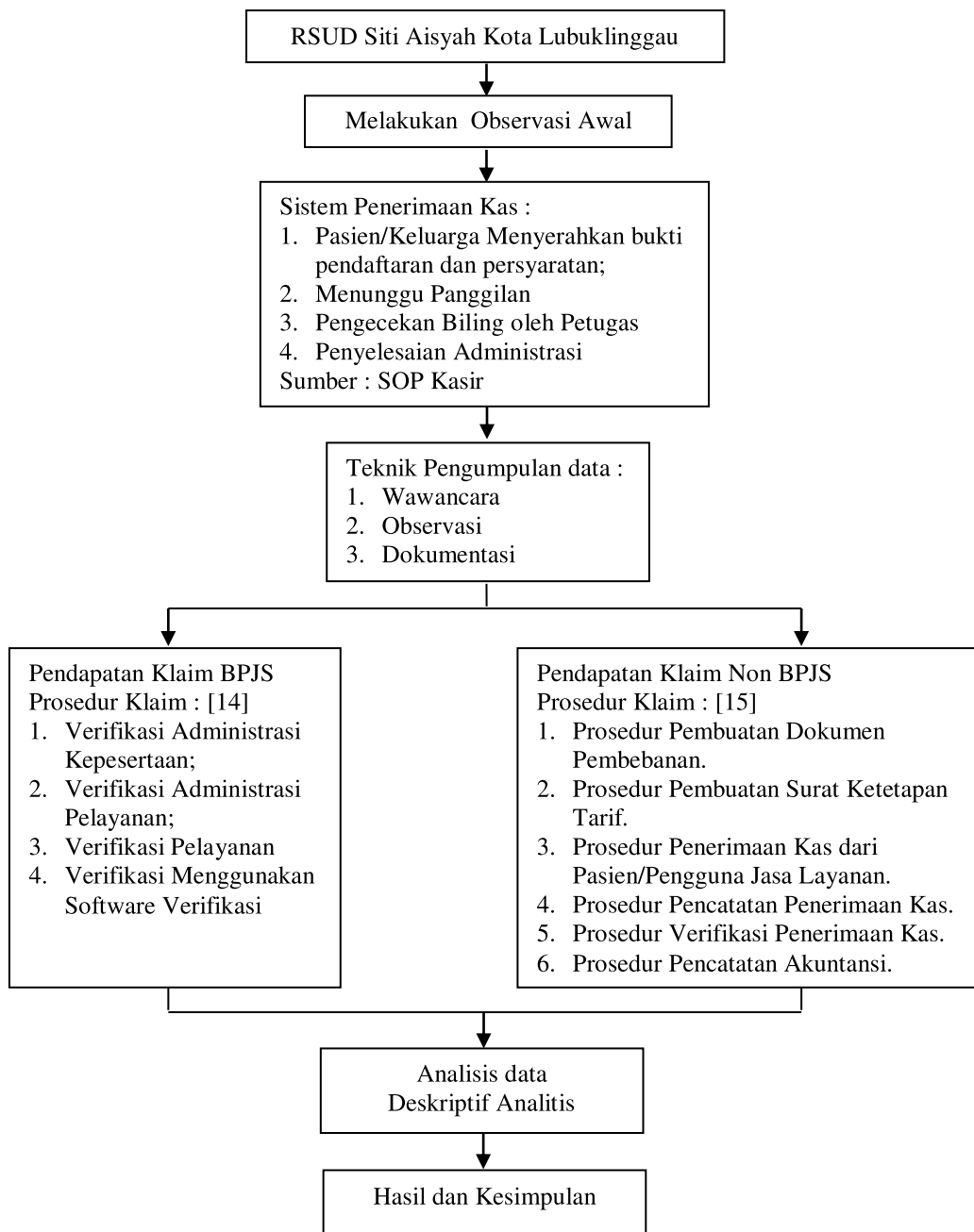
No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan/ Tahun 2021																							
		Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal	■	■	■	■																				
2	Pembutan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Perbaikan Proposal									■	■	■	■												
4	Ujian Proposal													■	■	■	■								
5	Pengumpulan Data																	■	■	■	■				
6	Pengelolaan																					■	■	■	■
7	Pembuatan Bab																					■	■	■	■
8	Perbaikan																					■	■	■	■
9	Ujian Skripsi																					■	■	■	■

Sumber : Data Diolah (2021)

3.2 Rancangan Penelitian

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini untuk menguji Sistem Penerimaan Kas Atas Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. adapun dijelaskan pada gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3.1
Rancangan Penelitian

3.2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. [16]

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dengan rancangan sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi dan pengamatan pada Bagian Pelayanan IGD, Pendaftaran Pasien, dan Bagian Keuangan.
- b. Melakukan wawancara pada Petugas yang melakukan klaim BPJS, Non BPJS dan Bagian Keuangan.
- c. Data yang diperoleh dari hasil observasi, pengamatan dan wawancara tersebut kemudian dicatat.
- d. Dokumentasi.
- e. Triangulasi.

3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan cara memperolehnya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan fanel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.[16]

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintahan, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. [16]

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa wawancara dengan mengadakan pertemuan secara langsung kepada bagian keuangan dan bendahara RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Data sekunder berupa data pendapatan RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan data primer. Data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu : [16]

3.5.1 Wawancara

yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil secara langsung pada perusahaan dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berwenang mengenai objek yang akan diteliti yaitu bagian penerimaan kas dan bendahara.

3.5.2 Observasi

Yaitu pengamatan langsung atau kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung objek penelitian tersebut.

3.5.3 Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan membuat daftar pernyataan/pernyataan kepada narasumber dan dokumen penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. [16]

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tingkat pendapatan, yaitu Teknik analisis deskriptif kualitatif Teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS, serta Teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung total pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS. Pada penelitian ini, menggunakan 2

teknik analisis diantaranya Teknik analisis deskriptif kualitatif dan Teknik analisis deskriptif kuantitatif yang akan menggambarkan sistem RSUD dalam penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020.

3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

3.7.1 Kredibilitas

Menurut [16] mendeskripsikan bahwa uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi, dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang diberikan merupakan data yang benar atau tidak.

Bila data yang diberikan tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh mengamati sekelompok masyarakat yang sedang berolahraga pagi, bagi orang awam olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik. Tetapi bagi peneliti kualitatif tentu akan lain kesimpulannya.

c. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun triangulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknik pengumpulan data, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel.

Triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber berupa pengumpulan data dari dua sumber yang berbeda yaitu dokumentasi dan wawancara.

d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau yang bertentangan dengan data yang ditemukan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

1) Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

2) Mengadakan Member Check

Member Check merupakan proses pengecekan data yang diambil peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh, serta agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan yang dimaksud sumber data atau pemberi informasi. Pelaksanaan *Member Check* dilakukan setelah satu

periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.

3.7.2 Transferabilitas

Menurut [16] transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Oleh sebab itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca lebih jelas atas hasil penelitian yang dilakukan. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, maka suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferabilitas), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3.7.3 Dependabilitas

Menurut [16] mendefinisikan bahwa uji dependabilitas disebut juga reliabilitas. Merupakan suatu penelitian yang reliabel apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, hingga membuat kesimpulan harus ditunjukkann. Jika peneliti tidak mempunyai serta tidak menunjukkan “jejak aktivitas lapangan”, maka dependabilitas peneliti patut diragukan.

3.7.4 Konfirmabilitas

Menurut [16] mendefinisikan bahwa pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektivitas bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Pengujian konfirmabilitas dapat dilakukan secara bersamaan, menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Aisyah adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Lubuklinggau, yang pertama kali didirikan berdasarkan akte notaris Badiyah Azhary. SH. Nomor. 35 tanggal 30 Maret 1990 dalam bentuk Yayasan yang diketua oleh Drs.H.Muhamad Syueb Tamat. Penyelenggaraan Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah berdasarkan surat izin sementara Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Selatan Nomor. YM.01.02.3.2.8420 tanggal 10 Oktober 1994.

Dana untuk pembangunan pertama kali dibantu pula atas sumbangan gotong royong para PNS Kabupaten Musi Rawas pada masa itu sebesar Rp. 2500,- per orang. Sejalan dengan maju mundurnya penyelenggaraan Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah, maka berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah No. 39/YRSSA/SK/XI/2002, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002 Penyelenggaraan Rumah Sakit dinyatakan ditutup.

Melihat situasi dan kondisi Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah yang tidak terawat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pada tanggal 11 Maret 2004 Penyelenggaraan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah secara operasional diserahkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau, melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Ketua Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau dan pada tanggal 19 Desember 2006 seluruh asset milik Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah diserahkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Selanjutnya melalui Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor : 03 Tahun 2007 Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Resmi menjadi milik Kota Lubuklinggau. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan yang dicapai maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 ditetapkan statusnya menjadi rumah sakit tipe D. Rumah Sakit Siti Aisyah terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan. Pada akhirnya pada tahun 2012 RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau resmi menjadi Rumah Sakit Kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/907/12 tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan perkembangannya maka pada tanggal 31 Mei 2010 maka dilantiklah pejabat struktural pada lingkungan RSUD Siti Aisyah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 821.2/ 98/KPTS/BKD.III/2010 Tanggal 29 Mei 2010, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 9). Kemudian direvisi ulang menjadi Peraturan

Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1).

Penelitian ini untuk melihat Sistem Penerimaan Kas Atas Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Prosedur penelitian ini dengan rancangan sebagai berikut: Melakukan observasi dan pengamatan pada Bagian Pelayanan IGD, Pendaftaran Pasien, dan Bagian Keuangan, Melakukan wawancara pada Petugas yang melakukan klaim BPJS, Non BPJS dan Bagian Keuangan, Data yang diperoleh dari hasil observasi, pengamatan dan wawancara tersebut kemudian dicatat, Dokumentasi, Triangulasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa wawancara dan komunikasi menggunakan pertanyaan secara lisan kepada bagian keuangan dan bendahara RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Data sekunder berupa data pendapatan RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan membuat daftar pernyataan/pernyataan kepada narasumber dan dokumen penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

4.2 Hasil Penelitian

1. Sistem Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Klaim BPJS Kesehatan RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penelitian analisis deskriptif kualitatif yang berupaya menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dan penelitian Kualitatif berupaya mengetahui bagaimana perbandingan atas penerimaan kas pada pendapatan atas klaim BPJS pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Berikut data dijelaskan pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Data Penerimaan Kas atas Pendapatan BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau

Bulan	Pendapatan Klaim BPJS		Persentase BPJS
	2019	2020	
	(Rp)	(Rp)	%
	(1)	(2)	$\frac{(3) - (2) - (1)}{(1)} * 100\%$
Januari	2.100.000.000	2.300.000.000	10%
Februari	1.550.000.000	1.900.000.000	23%
Maret	1.545.000.000	1.600.000.000	4%
April	1.700.000.000	571.000.000	-66%
Mei	1.500.000.000	754.000.000	-50%
Juni	1.500.000.000	820.000.000	-45%
Juli	1.700.000.000	963.000.000	-43%
Agustus	1.792.000.000	929.000.000	-48%
September	1.782.000.000	909.000.000	-49%
Oktober	2.070.000.000	769.000.000	-63%
November	2.200.000.000	793.000.000	-64%
Desember	2.170.000.000	743.000.000	-66%
Total	21.609.000.000	13.051.000.000	-40%

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 21.609.000.000,- sedangkan pada Tahun 2020 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 13.051.000.000,- atau selisih sebesar Rp. 8.558.000.000,- atau terjadi penurunan sebesar 40%. Awal terjadinya penurunan terlihat pada bulan april 2020 dimana pendapatan menurun sejumlah Rp. 1.129.000.000 atau 66% jika dibandingkan dengan bulan april Tahun 2019, hal demikian sesuai dengan yang disampaikan oleh bendahara RSUD Siti Aisyah Ibu Dione, S.E., M.M bahwa telah terjadi penurunan pendapatan BPJS maupun non BPJS yang terjadi akibat dari penerapan dari kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik tingkat pusat maupun didaerah, serta meminimalisir terjadinya penularan COVID 19 di Kota Lubuklinggau akibatnya membuat pegawai teknis dalam administrasi klaim BPJS menjadi terhambat dikarenakan adanya *Work From Home* (Kerja dari rumah). Sistem dan prosedur yang dilakukan oleh RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dalam memperoleh pendapatan BPJS, dijelaskan sebagai berikut :

1) Persyaratan Pelayanan BPJS Kesehatan

- a. Bukti Pendaftaran
- b. Bukti persyaratan kelengkapan jaminan (Fotocopy Kartu BPJS, dan Surat Rujukan)
- c. Surat Elegibilitas Peserta
- d. Bukti Tindakan

2) Prosedur Klaim BPJS Kesehatan

- a) Verifikasi Administrasi Kepesertaan;
- b) Verifikasi Administrasi Pelayanan;
- c) Verifikasi Pelayanan
- d) Verifikasi Menggunakan Software Verifikasi

Dimana cara ini merupakan proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui sistem yang lebih efektif berdasarkan pada unsur informasi yang relevan, informasi yang handal, informasi yang dapat dipercaya, informasi harus lengkap, informasi harus tepat waktu, informasi harus dapat dipahami dan informasi harus dapat diverifikasi yang akan dipaparkan berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara secara langsung oleh ibu Dione, S.E., M.M selaku Bendahara RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, sebagai berikut:

- a. Informasi yang Relevan berarti bahwa informasi benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna informasi akuntansinya. Relevansi informasi untuk setiap pengguna informasi akuntansi berbeda-beda. Informasi dikatakan relevan bila informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan untuk membuat prediksi atau mengkonfirmasi, atau ekspektasinya dimasa lalu.
- b. Informasi Harus Handal (Akurat) Informasi dikatakan handal jika informasi tersebut tidak memiliki kesalahan yang sifatnya material dan bias, serta secara akurat dapat menjelaskan kejadian atau aktivitas

organisasi. Kesalahan-kesalahan material ada ketika informasi yang tidak akurat menyebabkan pemakaiannya membuat keputusan yang buruk atau gagal. RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau pada informasi yang handal (akurat) dapat dipercaya dari hasil verifikasi data yang diolah oleh para pegawai.

- c. Informasi Harus Lengkap Informasi dikatakan lengkap apabila tidak ada bagian informasi yang essential bagi pengambil keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang. Informasi yang lengkap tidak menimbulkan kesulitan bagi pemakainya, karena informasi yang disertakan itu akan menjadi unsur kepastian yang besar. RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau memiliki informasi yang memadai atau lengkap tanpa harus mencari informasi yang mendukung.
- d. Informasi Harus Tepat Waktu Informasi dikatakan tepat waktu bila informasi tersedia pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi harus disampaikan secepat mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan perusahaan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Informasi datang kepenerima tidak boleh terlambat karena umur informasi merupakan faktor yang critical dalam menentukan kegunaannya. Dalam RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau memiliki informasi yang tepat waktu yang akan dibahas disetiap pertemuan.
- e. Informasi Harus Dapat Dipahami Informasi dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan tersebut dalam format yang dapat dimengerti.

Informasi dapat dimengerti oleh pengguna informasi akuntansi karena dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan pengetahuan pengguna informasi akuntansi. Informasi yang ada pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau sudah dapat dipahami karena menggunakan basis komputer yang memudahkan dalam pemrosesan aktivitas rumah sakit.

- f. Informasi Harus Dapat Diverifikasi Informasi itu dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik secara individu dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama dengan bukti berdasarkan data-data dan pernyataan yang benar. Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau informasi yang digunakan telah diverifikasi dan dievaluasi pada rapat kerja perminggu.

Adapun masalah BPJS yang ada di dalam RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dimana anggaran perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun yang juga diimbangi dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan jumlah fasilitas kesehatan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan juga meningkat. Namun pemerintah saat ini belum mampu menaikkan iuran bulanan peserta BPJS, fakta ini menunjukkan bahwa iuran BPJS yang saat ini belum sesuai dengan perhitungan iuran minimal yang sudah dihitung DJSN. Keterlambatan pembayaran iuran oleh peserta BPJS sehingga menyebabkan adanya kendala dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Terkait dengan BPJS non PBI sering terkendala dari

maraknya peserta non PBI yang menunggak pembayaran iuran. Hal ini menjadi sesuatu yang urgent sebab pihak rumah sakit tidak akan memberikan pelayanan apapun terhadap peserta non PBI yang belum melunasi pembayaran iurannya.

Dengan demikian sistem akuntansi penerimaan kas BPJS Kesehatan pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau sudah baik atau sudah terpenuhi semua unsur karakteristik yang dijalankan oleh rumah sakit. Kesesuaian tersebut meliputi peraturan BPJS Kesehatan tentang petunjuk teknis verifikasi klaim BPJS dimana petugas RSUD sudah menjalankan sistem yang ada, sehingga dalam klaim penerimaan kas atas Pendapatan BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau tidak terjadi kendala, namun selama periode 2019 sampai 2020 akibat pandemic covid 19 tentu ada masalah dalam proses klaim dimana petugas yang bekerja dirumah (*Work From Home*) membuat proses klaim menjadi terhambat.

2. Sistem Penerimaan Kas Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian analisis deskriptif kuantitatif yang berupaya mengetahui bagaimana sistem dan menghitung total penerimaan kas atas pendapatan Non BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Pendapatan Non BPJS merupakan pendapatan yang diterima dari hasil pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada pasien. Selanjutnya setelah didapatkan, data yang terdiri dari data pendapatan non BPJS selama 2 Tahun yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

diakumulasikan secara keseluruhan untuk mengetahui total pendapatan Non BPJS pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya yang selanjutnya dihitung persentase untuk mengetahui tingkat perbandingan pendapatan Non BPJS dari setiap bulan. Adapun data penerimaan kas atas pendapatan non BPJS dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Data Penerimaan Kas atas Pendapatan Non BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau

Bulan	Pendapatan Klaim Non BPJS		Persentase BPJS
	2019	2020	
	(Rp)	(Rp)	%
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1) / (1) * 100%
Januari	912.040.742	557.833.424	-39%
Februari	806.172.435	432.628.138	-46%
Maret	721.436.914	417.900.520	-42%
April	686.191.175	222.282.988	-68%
Mei	676.583.386	280.523.286	-59%
Juni	485.444.114	212.331.601	-56%
Juli	661.075.367	281.708.712	-57%
Agustus	477.212.769	206.153.912	-57%
September	506.051.206	295.735.663	-42%
Oktober	627.905.730	206.153.912	-67%
November	527.441.675	415.294.270	-21%
Desember	592.393.816	311.560.478	-47%
Total	7.679.949.329	3.840.106.904	-50%

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 penerimaan kas atas pendapatan Non BPJS sebesar Rp. 7.679.949.329,- sedangkan pada Tahun 2020 penerimaan kas atas pendapatan Non BPJS sebesar Rp. 3.840.106.904,- atau selisih sebesar Rp. 3.829.842.425,- atau terjadi penurunan sebesar 50%. Awal terjadinya penurunan terlihat pada bulan april 2020 dimana pendapatan menurun sejumlah Rp. 463.908.187

atau 68% jika dibandingkan dengan bulan april Tahun 2019. Seperti penerimaan kas atas pendapatan BPJS Kesehatan telah terjadi penurunan, di pendapatan non BPJS tepatnya bulan April awal mulanya, terjadi dampak pandemi covid 19 juga menyebabkan penurunan pendapatan yang terjadi di RSUD Siti Aisyah, hal tersebut bisa diakibatkan dari penerapan PSBB yang membuat pegawai bekerja melalui rumah atau *Work From Home*, sehingga dalam penerimaan kas non BPJS ikut menerima dampak tersebut karena jam pelayanan yang terbatas, poli kesehatan yang ditutup dan kebanyakan pasien atau masyarakat melakukan konsultasi kepada dokter pribadi atau dokter praktek umum.

Pendapatan pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, berasal dari beberapa jenis pendapatan namun pada penelitian ini penelitian berfokus pada pendapatan Non BPJS. Sistem yang digunakan dalam penerimaan kas Non BPJS diantaranya sebagai berikut :

- 1) Persyaratan Pelayanan Non BPJS Pasien Umum
 - a) Bukti Pendaftaran
 - b) Fotocopy KTP
- 2) Persyaratan Pelayanan Non BPJS Pasien Jamsoskes
 - a) Bukti Pendaftaran
 - b) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
 - c) Persyaratan Jamsoskes yang sudah di cap lengkap
 - d) Bukti Tindakan
- 3) Persyaratan Pelayanan Non BPJS Pasien Rawat Inap
 - a) Lembar Resep

b) Persyaratan Jaminan

4) Prosedur Klaim Non BPJS

a) Prosedur Pembuatan Dokumen Pembebanan.

b) Prosedur Pembuatan Surat Ketetapan Tarif.

c) Prosedur Penerimaan Kas dari Pasien/Pengguna Jasa Layanan.

d) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas.

e) Prosedur Verifikasi Penerimaan Kas.

f) Prosedur Pencatatan Akuntansi.

Terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan kesehatan yang menjadi sumber utama, sehingga perlunya menunggu anggaran selanjutnya untuk melunasi pembayaran yang tertunda atau dengan beralih ke anggaran lainnya. Menjadi Golongan peserta non BPJS terdiri penduduk Lubuklinggau yang masih belum dapat menggunakan kartu BPJS yang artinya Non BPJS diperuntukkan untuk semua penduduk yang tidak mempunyai asuransi kesehatan lainnya dan hanya mendapatkan jenis pelayanan kelas 3.

Berdasarkan penelitian mengenai sistem akuntansi penerimaan kas non BPJS RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau berdasarkan kajian teori ditemukan bahwa seluruh komponen telah berjalan sesuai dengan prosedur didukung oleh sistem pengendalian yang baik, dan sistem yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Siti Aisyah. Adapun Tugas BLUD RSUD Siti Aisyah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat

dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Dalam sistem akuntansi RSUD sudah mematuhi dan menjalankan peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Berdasarkan Bab III sistem Akuntansi Keuangan RSUD Pasal 3 menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan RSUD harus di Akuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, dan dalam hal RSUD menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa peraturan tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Sistem Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Klaim BPJS Kesehatan Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Pada Tahun 2019 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 21.609.000.000,- sedangkan pada Tahun 2020 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 13.051.000.000,- atau selisih sebesar Rp. 8.558.000.000,- atau terjadi penurunan sebesar 40%. Awal terjadinya penurunan terlihat pada bulan april 2020 dimana pendapatan menurun sejumlah Rp. 1.129.000.000 atau 66% jika dibandingkan dengan bulan april Tahun 2019.

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi dari hasil kegiatan penerimaan kas dari pasien yang menggunakan BPJS dan Non BPJS. Adapun masalah BPJS yang ada di dalam RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dimana anggaran perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun yang juga diimbangi dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan jumlah fasilitas kesehatan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan juga meningkat. Namun pemerintah saat ini belum mampu menaikkan iuran bulanan peserta BPJS, fakta ini menunjukkan bahwa iuran BPJS yang saat ini belum sesuai dengan perhitungan iuran minimal yang sudah dihitung DJSN. Dan keterlambatan pembayaran iuran oleh peserta BPJS sehingga menyebabkan adanya kendala dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Terkait dengan BPJS non PBI sering terkendala dari maraknya peserta non PBI yang menunggak pembayaran iuran. Hal ini menjadi sesuatu yang urgent sebab pihak rumah sakit tidak akan memberikan pelayanan apapun terhadap peserta non PBI yang belum melunasi pembayarannya.

Sistem dan prosedur yang dilakukan oleh RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau dalam memperoleh pendapatan BPJS, dijelaskan sebagai berikut :

1) Persyaratan Pelayanan BPJS Kesehatan

- a. Bukti Pendaftaran
- b. Bukti persyaratan kelengkapan jaminan (Fotocopy Kartu BPJS, dan Surat Rujukan)
- c. Surat Elegibilitas Peserta
- d. Bukti Tindakan

2) Prosedur Klaim BPJS Kesehatan

- a. Verifikasi Administrasi Kepesertaan;
- b. Verifikasi Administrasi Pelayanan;
- c. Verifikasi Pelayanan
- d. Verifikasi Menggunakan Software Verifikasi

Dimana cara ini merupakan proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan untuk tercapainya

tujuan organisasi melalui sistem yang lebih efektif berdasarkan pada unsur informasi yang relevan, informasi yang handal, informasi yang dapat dipercaya, informasi harus lengkap, informasi harus tepat waktu, informasi harus dapat dipahami dan informasi harus dapat diverifikasi.

Dengan demikian sistem akuntansi penerimaan kas BPJS Kesehatan pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau sudah baik atau sudah terpenuhi semua unsur karakteristik yang dijalankan oleh rumah sakit. Kesesuaian tersebut meliputi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam melaksanakan fungsi dalam pasal 9, BPJS pasal 10f bertugas untuk membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Serta Peraturan BPJS Kesehatan tentang petunjuk teknis verifikasi klaim BPJS dimana petugas RSUD sudah menjalankan sistem yang ada, sehingga dalam klaim penerimaan kas atas Pendapatan BPJS RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau tidak terjadi kendala, namun selama periode 2019 sampai 2020 akibat pandemi covid 19 tentu ada masalah dalam proses klaim dimana petugas yang bekerja dirumah (*Work From Home*) membuat proses klaim menjadi terhambat.

Berdasarkan pembahasan dijelaskan dari kedua fenomena yang terjadi, terdapat kecocokan dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian Fatimah dkk, (2020) dengan judul Sistem Penerimaan Kas atas

Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS Pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare. Hasil menunjukkan bahwa bagian sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare sudah baik dan semua unsur dalam sistem penerimaan kas melalui klaim BPJS sudah terpenuhi.

5.2 Sistem Penerimaan Kas Terhadap Pendapatan Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Pada Tahun 2019 penerimaan kas atas pendapatan Non BPJS sebesar Rp. 7.679.949.329,- sedangkan pada Tahun 2020 penerimaan kas atas pendapatan Non BPJS sebesar Rp. 3.840.106.904,- atau selisih sebesar Rp. 3.829.842.425,- atau terjadi penurunan sebesar 50%. Awal terjadinya penurunan terlihat pada bulan april 2020 dimana pendapatan menurun sejumlah Rp. 463.908.187 atau 68% jika dibandingkan dengan bulan april Tahun 2019.

Berdasarkan dari keterangan Ibu Dione, S.E., M.M dari hasil wawancara didapat kecocokkan antara keterangan dengan dengan data, Seperti penerimaan kas atas pendapatan BPJS Kesehatan telah terjadi penurunan, di pendapatan non BPJS tepatnya bulan April awal mulanya, terjadi dampak pandemi covid 19 juga menyebabkan penurunan pendapatan yang terjadi di RSUD Siti Aisyah, hal tersebut bisa diakibatkan dari penerapan PSBB yang membuat pegawai bekerja melalui rumah atau *Work From Home*, dalam penerimaan kas non BPJS ikut menerima dampak tersebut karena jam pelayanan yang terbatas, poli kesehatan yang ditutup

dan kebanyakan pasien atau masyarakat melakukan konsultasi kepada dokter pribadi atau dokter praktek umum.

Berdasarkan penelitian mengenai sistem akuntansi penerimaan kas non BPJS RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau berdasarkan kajian teori ditemukan bahwa seluruh komponen telah berjalan sesuai dengan prosedur didukung oleh sistem pengendalian yang baik, dan sistem yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Siti Aisyah. Adapun Tugas BLUD RSUD Siti Aisyah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Sistem yang digunakan dalam penerimaan kas Non BPJS sesuai perwako No 15 Tahun 2015 pada Bab III pasal 3 menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, dalam hal RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan system akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD. Pada pasal 7 menerangkan bahwa Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan akun standar. Adapun pada pasal 9 menerangkan bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi :

- a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
- b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
- c. Prosedur Akuntansi Aset;
- d. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Dalam sistem akuntansi RSUD sudah mematuhi dan menjalankan peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Berdasarkan Bab III sistem Akuntansi Keuangan RSUD Pasal 3 menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan RSUD harus di Akuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, dan dalam hal RSUD menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa peraturan tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pembahasan dijelaskan dari kedua fenomena yang terjadi, terdapat kecocokan dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian Fatimah dkk, (2020) dengan judul Sistem Penerimaan Kas atas Pendapatan Klaim BPJS dan Non BPJS Pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare. Hasil menunjukkan bahwa bagian sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare sudah baik dan tingkat perbandingan antara pendapatan klaim BPJS dan Non BPJS sebesar 72%.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.6.2 Sistem Penerimaan Kas Klaim BPJS dan Klaim Non BPJS pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik sistem akuntansi penerimaan kas atas pendapatan yang hampir terpenuhinya dan sudah mematuhi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan BPJS Kesehatan tentang petunjuk teknis verifikasi klaim BPJS, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015, SOP RSUD Siti Aisyah yang ada dalam melakukan klaim baik pada BPJS maupun Non BPJS.

1.6.3 Perbandingan Klaim BPJS Pada Tahun 2019 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 21.609.000.000,- sedangkan pada Tahun 2020 penerimaan kas atas pendapatan BPJS sebesar Rp. 13.051.000.000,- atau selisih sebesar Rp. 8.558.000.000,- atau terjadi penurunan sebesar 40%.

6.2 Saran

Dalam mencapai tujuan perusahaan, maka penulis mengemukakan beberapa saran kepada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Berdasarkan data dan hasil penelitian penulis sebagai berikut:

1. Melihat pelayanan yang sudah berjalan dengan baik maka RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau tetap melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan selalu memperhatikan kritik dan saran dari

pasien sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

2. Sebaiknya RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau bekerja secara optimal dalam melakukan fungsi pelayanan, perawatan bukan hanya secara profesional tetapi juga santun dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiono, “Sistem Penerimaan Kas Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Kulon Progo,” Universitas Teknologi Yogyakarta, 2017.
- [2] M. N. Fatimah dan Achmar, “Sistem Penerimaan Kas Atas Pendapatan Klaim BPJS Dan Non BPJS Pada RSUD A. Makkasau Kota Parepare,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 3, no. April, pp. 29–36, 2020.
- [3] T. / U. M. B. Dosen, *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan eLearning, 2013.
- [4] Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit.” p. 152, 2010.
- [5] Peraturan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta, 2011.
- [6] Peraturan Walikota Lubuklinggau, *Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau*. Lubuklinggau: Perwakot Lubuklinggau, 2015.
- [7] B. U. Nugroho, “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Kas Dan Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pasien Rawat Inap Non BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Studi Kasus di Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta,” Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016.
- [8] M. Anggraini, “Efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dengan sistem hospital online di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun,” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- [9] Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [10] C. S. dkk Warren, *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [11] A. Susanto, “Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengolahan Transaksi Pendahuluan,” p. 178, 2017.
- [12] Z. Baridwan, *Sistem Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- [13] V. W. Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

- [14] BPJS Kesehatan, “Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan,” *Badan Penyelenggara Jaminan Sos. Kesaehatan*, pp. 1–26, 2014.
- [15] SOP RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, *SOP Penerimaan Kas dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau .pdf*. Lubuklinggau, 2007.
- [16] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.